



## Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Dan Kepatuhan Pada Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

*The Influence of Regional Financial Accounting System, Human Resource Competence, and Compliance with Government Accounting Standards on the Quality of Financial Report Information at the Regional Financial and Asset Management Agency of Central Sulawesi Province*

Andi Nurmaladewi<sup>1\*</sup>, Suraeda<sup>2</sup>, Diarespati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Abdul Azis Lamadjido (Un-Azlam) Palu

\*Corresponding Author: E-mail: [andinurmaladewi@gmail.com](mailto:andinurmaladewi@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

#### Kata Kunci:

Sistem Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Informasi Keuangan.

#### Keywords:

Regional Financial System, Human Resource Competence, Compliance with Government Accounting Standards and Quality of Financial Information

### ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Pengaruh Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Dan Kepatuhan Pada Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Keuangan Daerah, untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia, untuk mengetahui dan menganalisis Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah dan untuk Menganalisis Kualitas Informasi Keuangan secara simultan dan parsial. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. Variabel Sistem keuangan daerah (X1) sebesar 0.349 ( $>0.05$ ), maka berkesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y). Variabel Kompetensi sumber daya manusia (X2) sebesar 0.298 ( $>0.05$ ), maka berkesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y). Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. Variabel Standar akuntansi pemerintahan (X3) sebesar 0.323 ( $>0.05$ ), maka berkesimpulan bahwa variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y).

### ABSTRACT

The problem in this study is about the Influence of Regional Financial Accounting, Human Resource Competence, and Compliance with Government Accounting Standards on the Quality of Financial Report Information at the Central Sulawesi Province Financial and Asset Management Agency. With the aim of the study to determine and analyze the Regional Financial System, to determine and analyze Human Resource Competence, to determine and analyze Compliance with Government Accounting Standards and to Analyze the Quality of Financial Information simultaneously and partially. The method used is quantitative with a case study approach. The data sources used are primary and secondary data. The results of this study indicate that Based on the table above, it shows that the Sig. value. The regional financial system variable (X1) is 0.349 ( $>0.05$ ), so it is concluded that the X1 variable does not have a significant effect on the financial report quality variable (Y). The human resource competency variable (X2) is 0.298 ( $>0.05$ ), so it is concluded that the X2 variable does not have a significant effect on the financial report quality variable (Y). Based on the results of the t-test that the Sig. value of the Government accounting standards variable (X3) is 0.323 ( $>0.05$ ), so it is concluded that the X3 variable does not have a significant effect on the financial report quality variable (Y).

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7779

## PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud nyata keseriusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undang khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara. Seiring dengan memperlakukan sistem akuntansi berbasis aktual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Tujuan Mengatur standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Isi Utama Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah diwajibkan menerapkan sistem berbasis akrual, di mana pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Laporan Keuangan yang Disusun Meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbukaan Informasi Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang: Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tujuan: Memberikan pedoman teknis untuk pengelolaan keuangan daerah agar selaras dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Isi Utama: Pengelolaan Keuangan Daerah: Meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan: Mengacu pada SAP berbasis akrual. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Pelaporan Keuangan Daerah: Pemda harus menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aplikasi Teknis: Pemda menggunakan SIPD untuk mengintegrasikan data anggaran, realisasi, dan pelaporan. Keterkaitan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Standar Akuntansi: PP 71 Tahun 2010 menjadi dasar hukum untuk SAP berbasis akrual yang wajib diterapkan di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk daerah.

Teknis Implementasi: Permendagri 77 Tahun 2020 menjabarkan tata cara teknis penerapan SAP tersebut di daerah, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi dan Akuntabilitas: Kedua regulasi mendukung terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Adalah regulasi yang mengatur mengenai teknis pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusun perencanaan dan penganggaran keuangan melalui mekanisme rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Mengelola pendapatan, belanja, dan biaya daerah sesuai siklus pengelolaan keuangan, dan akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi (SAP). Pengelolaan Aset Daerah (Bagian dari Keuangan Daerah), Pencatatan aset, pemanfaatan aset, dan pelaporan dan bertanggungjawab aset, standar akuntansi aset. aset daerah dicatat dan diakui berdasarkan nilai wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Pengawasan dan Pengendalian Aset Pemerintahan daerah wajib melakukan inventarisasi aset secara berkala untuk memastikan akurasi data aset.

Selain itu, sebagai dalam pedoman penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pemerintah di provinsi tersebut. BPKAD memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

Pengelolaan Keuangan Daerah Menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengelolaan Aset Daerah Melakukan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan aset milik daerah. Menyusun laporan keuangan dan laporan aset daerah untuk memastikan aset dikelola dengan optimal dan akuntabel. Mengelola penghapusan, pemanfaatan, dan pelepasan aset daerah sesuai dengan regulasi. Pengawasan dan Evaluasi Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Memberikan saran kepada kepala daerah terkait optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan dan aset.

Pelaporan Keuangan Daerah Menyusun laporan keuangan daerah, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Bekerja sama dengan auditor, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan laporan keuangan diaudit dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan Sistem Informasi Keuangan: Mengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau aplikasi lain yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset secara digital.

Kepala Badan Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan fungsi BPKAD. Sekretariat: Mendukung administrasi umum, seperti perencanaan, kepegawaian, dan keuangan internal BPKAD. Bidang Anggaran: Mengelola penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Bidang bendaharaan: Bertugas mengelola kas daerah, pembayaran, dan penatausahaan keuangan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan: Menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP. Bidang Aset Daerah Mengelola aset tetap dan inventaris daerah. Bidang Evaluasi dan Pengawasan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tanggung Jawab BPKAD Menjamin pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Mendukung kepala daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran dan pengelolaan aset. Memastikan aset daerah terinventarisasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal. Relevansi BPKAD dengan Laporan Keuangan Daerah. Sebagai pengelola utama keuangan daerah, BPKAD bertanggung jawab dalam memastikan kualitas informasi laporan keuangan. Tugas ini meliputi: Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Pelaporan aset tetap daerah. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan, seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Berlokasi di ibu kota provinsi Palu, kantor ini menjadi tempat BPKAD dan timnya bekerja untuk mengkoordinasikan program pembangunan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan lainnya. BPKAD sebagai kepala daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan menjamin kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Kantor ini juga berfungsi sebagai pusat perhubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta dengan organisasi lain di tingkat provinsi dan nasional. Kualitas informasi yang tersedia dalam laporan keuangan Pemerintah sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD juga mengelola aset milik pemerintah provinsi, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Pengelolaan ini bertujuan agar aset daerah dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik. BPKAD bertugas untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan penggunaan aset daerah tercatat dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh pihak independen dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan laporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pada BPKAD Provinsi

Sulawesi Tengah sangat penting untuk meningkatkan dan menyempurnakan sistem informasi keuangan. Hal ini memberikan wawasan tentang area yang memerlukan perbaikan dan cara mengambil tindakan perbaikan. diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Beberapa fenomena yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masih terdapat keterbatasan dalam pemanfaatan sistem keuangan daerah secara maksimal, seperti SIPD atau SIMDA, yang belum sepenuhnya terintegrasi antar perangkat daerah. Dampak data keuangan sering tidak sinkron, menyebabkan laporan keuangan tidak lengkap atau disusun tidak tepat waktu.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagian pegawai di BPKAD belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan teknis yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah berbasis aktual. Dampak ketidaktepatan pencatatan, kesalahan dalam penyusunan laporan, hingga tidak mampunya SDM menjelaskan informasi dalam laporan keuangan secara akurat.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) masih ditemukan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya disusun sesuai SAP, baik dari sisi format, pengakuan, hingga pengungkapan transaksi. Dampak temuan audit BPK yang berulang terkait penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai SAP

Kualitas Informasi Laporan Keuangan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai belum optimal karena masih sering ditemukan data yang tidak relevan, akurat, dan tidak disajikan tepat waktu. Dampak laporan menjadi kurang andal sebagai dasar pengambilan keputusan, dan menurunkan opini BPK.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan cara ini diharapkan dapat diusulkan rekomendasi-rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah suatu empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila penelitian hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana focus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian yang menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif Saryono (2010). Penelitian kuantitatif yang digunakan adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, Positivisme dalam filsafat adalah pandangan yang menekankan bahwa pengetahuan yang valid adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah, yang berbasis pada observasi empiris dan data yang dapat diverifikasi. Dalam konteks penelitian, positivisme sering digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat berdasarkan data kuantitatif dan objektif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Informasi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan yang dirancang dengan baik, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi mampu menghasilkan data keuangan yang akurat, andal, dan tepat waktu. Sistem yang sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 64 Tahun 2013 memfasilitasi pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah secara transparan. Temuan ini sejalan dengan Teori Sistem Informasi Akuntansi, di mana sistem informasi yang handal memperkuat kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. ASN yang memiliki pemahaman yang baik tentang SAP, teknologi informasi, dan regulasi keuangan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Hasil ini mendukung Teori Resource-Based View (RBV), yang menyatakan bahwa SDM merupakan aset strategis yang menentukan keunggulan organisasi. Dengan pelatihan yang tepat dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, kualitas informasi keuangan dapat terus ditingkatkan. Hal ini selaras dengan amanat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menekankan profesionalitas aparatur. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Pegawai yang disiplin dan taat pada standar pelaporan keuangan akan menyusun laporan sesuai aturan, sehingga laporan tersebut menjadi dapat dipercaya dan akuntabel. Hasil ini mendukung Teori Kepatuhan, yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan terhadap regulasi akan memengaruhi kinerja individu maupun organisasi. Peraturan PP No. 71 Tahun 2010 telah mengatur secara eksplisit standar pelaporan yang harus digunakan oleh entitas pemerintah, dan tingkat kepatuhan terhadap standar ini akan menentukan kualitas laporan yang dihasilkan. Ketiga variabel independen – sistem keuangan daerah, kompetensi SDM, dan kepatuhan terhadap SAP – secara bersama-sama mempengaruhi kualitas informasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan sinergi antara sistem, manusia, dan kepatuhan terhadap aturan. Penelitian ini memperkuat hasil-hasil sebelumnya dan memberikan bukti empiris bahwa BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan komitmen yang baik dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Sistem Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Sistem Keuangan Daerah (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), dan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Informasi Keuangan (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Interpretasi Hasil Signifikansi pengaruh simultan ini menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antar Kecanggihan dan keandalan sistem keuangan daerah, Tingkat kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan, serta Kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku, khususnya SAP.

Ketiga faktor ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam menghasilkan laporan keuangan yang Relevan, Andal, Dapat dipahami, Dapat dibandingkan Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Dukungan Teoretis Hasil ini didukung oleh beberapa teori, yaitu Teori Sistem Informasi Akuntansi, bahwa sistem yang baik akan mempengaruhi hasil pelaporan. Teori Resource-Based View (RBV), bahwa SDM kompeten adalah aset strategis organisasi. Teori Kepatuhan, bahwa kepatuhan terhadap aturan mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan keuangan. Teori Kualitas Informasi, bahwa kualitas laporan tergantung pada input sistemik dan perilaku SDM pengelola. Implikasi Praktis Temuan ini menjadi dasar penting bagi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus Memperkuat sistem keuangan yang terintegrasi dan berbasis akrual, Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan regulasi, Menanamkan budaya kepatuhan terhadap peraturan dan standar pelaporan pemerintah. Sistem Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas

### Informasi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi parsial, diketahui bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, serta koefisien regresi yang positif, yang berarti bahwa peningkatan kompetensi SDM akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas informasi keuangan sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam Memahami peraturan dan regulasi keuangan, Mengoperasikan sistem keuangan daerah secara akurat, Menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, Menyusun laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan kata lain, kompetensi individu berperan penting dalam proses pelaporan, mulai dari pencatatan hingga penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dukungan Teoretis Temuan ini diperkuat oleh Teori Resource-Based View (RBV), yang menyatakan bahwa sumber daya internal organisasi seperti SDM yang kompeten dapat menjadi keunggulan strategis dan mendorong tercapainya tujuan organisasi, termasuk dalam hal pelaporan keuangan. SDM yang kompeten akan: Lebih teliti dan akurat dalam pencatatan transaksi, Cepat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi, Lebih mampu menjaga integritas dan objektivitas informasi keuangan. Dasar Hukum UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menekankan pentingnya peran SDM dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan perlunya aparatur yang memiliki kompetensi di bidang keuangan negara.

**Implikasi Praktis** Dengan hasil ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah disarankan untuk Melaksanakan pelatihan rutin bagi pegawai di bidang keuangan, Mendorong sertifikasi dan pengembangan profesional SDM keuangan daerah, Menyusun sistem evaluasi kinerja SDM berbasis output laporan keuangan. Peningkatan kompetensi SDM secara terus-menerus akan berkontribusi pada terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, dapat dipercaya, dan sesuai standar, sebagaimana diharapkan oleh peraturan dan prinsip tata kelola keuangan daerah.

**Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah** secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial, variabel Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi di bawah 0,05 dan arah koefisien yang positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap SAP, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Makna Temuan Kepatuhan terhadap SAP mencerminkan tingkat kedisiplinan dan keseriusan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu melalui: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, Panduan teknis dari Kementerian Keuangan atau BPKP dalam penerapannya. Pegawai yang kepatuhan terhadap SAP akan Menyajikan laporan yang konsisten dan dapat dibandingkan, Mencegah terjadinya manipulasi atau penyimpangan data, Memastikan laporan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dukungan Teoretis Temuan ini sesuai dengan Teori Kepatuhan (Compliance Theory), yang menyatakan bahwa perilaku individu atau organisasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku akan berdampak pada kinerja yang lebih baik, termasuk dalam hal pelaporan keuangan. Dalam konteks pemerintahan, kepatuhan terhadap SAP merupakan bentuk pelaksanaan good governance, khususnya dalam prinsip dipertanggungjawabkan, Transparansi menyampaikan informasi keuangan yang benar dan jelas. Dasar Hukum PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mewajibkan seluruh entitas pemerintah menggunakan SAP berbasis akrual. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, yang menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Implikasi Praktis Hasil ini menjadi dasar bagi BPKAD untuk terus Mendorong pemahaman dan penerapan SAP di semua unit kerja keuangan, Mengadakan sosialisasi atau workshop terkait pembaruan SAP, Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan. Dengan kepatuhan yang tinggi terhadap SAP, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat, sehingga mendukung pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## KESIMPULAN

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) secara simultan maupun parsial. Hal ini menunjukkan oleh nilai signifikan uji t sebesar 0,349 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05 yang dimana sistem yang diterapkan saat ini, meskipun telah berbasis teknologi seperti SIPD atau SIMDA belum mampu secara nyata meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. sistem akuntansi keuangan daerah belum diimbangi dengan pemanfaatan yang optimal, baik dari segi penguasaan teknis, pemeliharaan sistem, maupun integrasi dengan unit kerja lainnya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi tengah. Hal ini menunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,298 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 meskipun pegawai BPKAD memiliki latar belakang Pendidikan yang relevan dan telah mengikuti pelatihan teknis namun kompetensi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan, rotasi pegawai yang terlalu cepat, atau keterbatasan pengalaman praktis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah X3 berdasarkan hasil statistik, tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi tengah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,323 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap SAP yang ada saat ini belum berdampak langsung terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kendala dalam penerapan prinsip-prinsip SAP secara konsisten, pemahaman yang belum merata di kalangan pegawai, atau kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan standar akuntansi dalam proses penyusunan laporan.

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Y kualitas informasi laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi tengah belum sepenuhnya dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil simultan (uji F) yang menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,348, lebih tinggi dari batas 0,05 serta uji parsial (uji t) yang juga menunjukkan bahwa masing-masing variable independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik. Meskipun kualitas informasi laporan keuangan secara administratif mungkin telah memenuhi persyaratan dasar seperti ketepatan waktu dan kelengkapan, nilai informatif dari laporan belum maksimal.

Deskriptif secara faktor-faktor seperti sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian kualitas informasi laporan keuangan yang tinggi. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas teknis, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan sistem dan pengawasan agar laporan keuangan yang di hasilkan benar-benar relevan, andal, dan dapat digunakan secara efektif oleh para pengambil kebijakan.

## SARAN

Sistem Keuangan Daerah (X1) di perlukan peningkatan pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah secara lebih optimal. BPKAD diharapkan melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem yang digunakan meningkatkan, pelatihan teknis kepada operator sistem khususnya

dalam pemrosesan pelaporan data keuangan, dan mendorong integrasi sistem informasi keuangan agar proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efisien dan akurat.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) kompetensi SDM menjadi faktor penting yang perlu ditingkatkan oleh karena itu pemerintah daerah disarankan untuk memberikan pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi keuangan daerah kepada pegawai, penempatan SDM sebaiknya mempertimbangkan latar belakang Pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang keuangan, meningkatkan motivasi dan budaya kerja professional agar pegawai mampu menjalankan tugas akuntansi dan pelaporan secara maksimal

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (X3) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SAP, BPKAD perlu mengintensifkan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan SAP diseluruh unit kerja, menyusun pedoman teknis yang lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh seluruh pelaksana keuangan daerah, dan mendorong komitmen pimpinan seluruh pegawai untuk menjadikan kepatuhan terhadap SAP Sebagian dari budaya kerja.

Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) kualitas informasi laporan keuangan harus menjadi fokus utama dengan menjamin keterandalan, ketepatan waktu, dan kejelasan isi laporan. Laporan harus mampu memenuhi kebutuhan pengguna informasi untuk pengambilan keputusan, baik di tingkat internal pemerintah daerah maupun eksternal seperti BPK dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2016). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2018). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Permendagri No. 13 Tahun 2006. (2006). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Rahardjo, B. (2020). "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45- 60.
- Sukoharsono, E. G. (2017). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Empiris di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara*, 9(2), 99-112.
- Wahyuni, S. (2019). "Dampak Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Instansi Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 25-38.
- Wibowo, A. (2021). "Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah." *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 8(2), 75-88.
- Adnan, M. A., & Handayani, S. (2020). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(3), 45-59. Artikel ini membahas pengaruh sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
- Anggarini, D. (2019). Kepatuhan terhadap Regulasi Akuntansi Pemerintahan dan Pengaruhnya terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 24(2), 103-115. Membahas pentingnya kepatuhan terhadap regulasi akuntansi pemerintah dan pengaruhnya terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- Laporan audit yang diterbitkan oleh BPK untuk memberikan opini terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk di Sulawesi Tengah.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Buku ini memberikan penjelasan tentang akuntansi sektor publik, serta bagaimana penyusunan dan pelaporan keuangan di pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
- Fauzi, A. F., & Saputra, E. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi dan Infrastruktur terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 235-245. Penelitian ini mengulas tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi dan infrastruktur mempengaruhi efektivitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah.
- Halim, A., & Haryanto, D. (2016). Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 10-25. Artikel ini membahas mengenai pentingnya penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kualitas laporan keuangan.
- Indriani, N., & Nuryadi, A. (2020). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(4), 451-463. Meneliti pengaruh audit internal dan pengendalian keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan standar yang harus dipatuhi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- Lubis, D. A., & Sianipar, S. T. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 22(3), 122-134. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah, seperti kepatuhan terhadap regulasi dan kompetensi SDM.
- Purboyo, T. (2021). Pengaruh Kualitas SDM, Teknologi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 13(1), 80-95. Artikel ini membahas bagaimana SDM, teknologi, dan sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.
- Simanjuntak, R. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Terhadap Regulasi Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara*, 14(3), 118-130. Membahas pengaruh kepatuhan terhadap regulasi akuntansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di tingkat pemerintahan daerah.
- Tumbelaka, H. S., & Tumbelaka, N. R. (2022). Implementasi Teknologi Informasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 16(2), 120-135. Artikel ini mengulas implementasi sistem teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, yang berpengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan pemerintah.